

DYNAMIC GOVERNANCE DALAM MENGATASI STUNTING DI KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Bernadino Janson Jafa

NPP. 30.1107

*Asdaf Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Program Studi Administrasi Pemerintahan daerah*

Email: dhinojafa27@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): As a form of commitment to accelerate the reduction of stunting, the government has issued Presidential Regulation (Perpres) number 72 of 2021 concerning Accelerating the Reduction of Stunting. The prevalence of stunting in Manggarai Regency is at 5,297 cases or 20.0%. These calculations show that there are approximately 20 stunted toddlers out of 100 toddlers in Manggarai Regency. Based on the results of SGGI (2022), there are 3 sub-districts in Manggarai Regency which are in the "red" zone with a stunting prevalence above 30 percent. These sub-districts are Ruteng (30.1%), Wae Rii (33.6%) and Lelak (37.1%). In this research the authors focus on how Dynamic governance is implemented in Manggarai Regency in overcoming stunting.

Purpose: The aims of this research are to find out and analyze Dynamic governance in Overcoming Stunting in Manggarai Regency, East Nusa Tenggara Province. **Method:** This study uses a descriptive method with an inductive approach. There are several ways of collecting data used by researchers in this study, namely observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques used are Data Reduction, Data Display and Conclusion Drawing/Verivication. **Result:** The results of this study are Dynamic governance in overcoming stunting in Manggarai Regency. It can be seen from the results of the last stunting measurement in August 2022, namely 4,313 cases which showed a decrease in stunting cases from 5,320 cases in the February 2022 measurement. The stunting reduction policy is also increasing children's productivity which is the result of the collaboration of various sectors in charge of handling stunting in Manggarai Regency. **Conclusion:** The Manggarai Regency Government is advised to increase stunting handling interventions through cooperation between each sector in order to increase the productivity of children in Manggarai Regency. Then the Manggarai district government is also advised to be able to determine the right policy direction by taking into account social and environmental changes and the evaluation results of previous programs.

Keywords: Dynamic Governance, Overcoming Stunting, Policy

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mempercepat penurunan stunting, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Prevalensi stunting Kabupaten Manggarai berada pada angka 5.297 kasus atau 20,0%. Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kurang lebih ada 20 balita stunting diantara 100 balita yang ada di Kabupaten Manggarai. Berdasarkan hasil SGGI (2022), terdapat 3

kecamatan di Kabupaten Manggarai yang berada di zona “merah” dengan prevalensi stunting di atas 30 persen. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Ruteng (30,1%), Wae Rii (33,6%) dan Lelak (37,1%). Dalam penelitian ini penulis berfokus pada bagaimana *Dynamic governance* diterapkan di Kabupaten Manggarai dalam mengatasi stunting. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis *Dynamic governance* Dalam Mengatasi Stunting di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Terdapat beberapa cara pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi. Teknik Analisis Data yang digunakan adalah Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data) dan Conclusion Drawing/Verification (Penerarikan Kesimpulan). **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini adalah *Dynamic governance* dalam mengatasi stunting di Kabupaten Manggarai dapat dilihat dari hasil pengukuran stunting terakhir pada bulan agustus tahun 2022 yakni 4.313 kasus dimana menunjukkan penurunan kasus stunting dari 5.320 kasus pada pengukuran bulan february tahun 2022. Kebijakan penerunan stunting juga meningkatkan produktivitas anak yang merupakan hasil dari kerjasama berbagai sektor yang bertugas dalam penanganan stunting di Kabupaten Manggarai. **Kesimpulan:** Pemerintah Kabupaten Manggarai disarankan untuk meningkatkan intervensi penanganan stunting melalui kerjasama antar setiap sektor guna meningkatkan produktivitas anak di Kabupaten Manggarai. Kemudian Pemerintah kabupaten Manggarai juga disarankan mampu menentukan arah kebijakan yang tepat dengan memperhatikan perubahan sosial, lingkungan serta hasil evaluasi terhadap program sebelumnya.

Kata kunci: *Dynamic Governance*, Mengatasi Stunting, Kebijakan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Banul dkk (2022) menyebutkan stunting merupakan “salah satu masalah serius yang dihadapi oleh dunia termasuk Indonesia. Kejadian stunting dianggap serius karena mengakibatkan keterlambatan perkembangan motorik dan menurunnya tingkat kecerdasan pada balita.” Stunting adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kasus stunting atau balita pendek berpotensi disalahgunakan sebagai ukuran kesehatan penduduk, karena status gizi yang buruk dapat mempengaruhi kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Kemudian Rahmadhita (2020) menambahkan stunting adalah “masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi.” Stunting dapat terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun, dan bila tidak diimbangi dengan catch-up growth (tumbuh kejar) mengakibatkan menurunnya pertumbuhan, masalah stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan meningkatnya risiko kesakitan, kematian dan hambatan pada pertumbuhan baik motorik maupun mental.

Kusumawati, Rahardjo, & Permata (2015) menyatakan stunting merupakan “indikator yang sensitif untuk menilai keadaan sosial ekonomi yang buruk. Dampak stunting sangat luas, tidak hanya pada individu tetapi juga pada lingkup negara karena mempengaruhi ekonomi dan pembangunan negara. Hal tersebut terjadi karena kualitas anak yang mengalami stunting berbeda dengan anak yang sehat.” Anak yang mengalami stunting sistem imunitas tubuhnya akan menurun. Kondisi tersebut memudahkan anak stunting menderita penyakit infeksi.

Yuliani dkk (2020) menyatakan “masa balita menjadi masa yang rawan mengalami masalah kurang gizi, hal tersebut dikarenakan pada masa balita tubuh mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang relatif cepat dibandingkan masa-masa yang lain. Pertumbuhan dan perkembangan tubuh pada masa balita menentukan kualitas pertumbuhan di masa yang akan datang.”

Menurut Sulistyarningsih, Panunggal, & Murbawani (2018) “secara umum penyebab stunting pada anak dapat dibedakan menjadi dua yaitu penyebab langsung dan penyebab tidak langsung.” Penyebab langsung terjadinya stunting adalah tingkat konsumsi zat gizi, faktor keturunan dan penyakit infeksi yang diderita anak. Zat gizi yang diperlukan tubuh terdiri atas zat gizi makro dan zat gizi mikro. Penyebab tidak langsung stunting antara lain pengetahuan ibu tentang gizi, pola asuh orang tua, tingkat pendapatan orang tua, dan pemanfaatan pelayanan Kesehatan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Di dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. Kep. 124/M.Ppn/Hk/10/2021 Tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Pangan Dan Gizi Tahun 2021-2024, pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting 14 persen di tahun 2024 dan target pembangunan berkelanjutan di tahun 2030 berdasarkan capaian di tahun 2024. Berdasarkan Lima Pilar Percepatan Penurunan Stunting, akan disusun Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk mendorong dan menguatkan konvergensi antar program melalui pendekatan keluarga berisiko stunting.

Berdasarkan data SSGI (Studi Kasus Gizi Indonesia) tahun 2022, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih memiliki 3 kabupaten berkategori “merah”. Penyetoran status merah tersebut berdasarkan prevalensi stuntingnya masih di atas 30 persen. Ke-3 kabupaten tersebut adalah Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara dan Sumba Barat Daya. Sementara 8 kabupaten dan kota berstatus “kuning” dengan prevalensi 20 hingga 30 persen, diantaranya Sumba Barat, Kupang, Belu, Lembata, Flores Timur, Manggarai, Rote Ndao, dan Sabu Raijua.

Prevalensi stunting Kabupaten Manggarai berada pada angka 5.297 kasus atau 20,0%. Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kurang lebih ada 20 balita stunting diantara 100 balita yang ada di Kabupaten Manggarai. Berdasarkan hasil SGGI (2022), terdapat 3 kecamatan di Kabupaten Manggarai yang berada di zona “merah” dengan prevalensi stunting di atas 30 persen. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Ruteng (30,1%), Wae Rii (33,6%) dan Lelak (37,1%).

Kemudian Kecamatan Cibal (22,3%) dan Cibal Barat (24,1%) berada pada zona “kuning” dengan prevalensi stunting 20-30 persen. Sedangkan 7 kecamatan lainnya berstatus “hijau” dengan prevalensi di bawah 20%. Adapun masing-masing angka prevalensi stunting kecamatan tersebut adalah; Satar Mese (16,6%), Satar Mese Barat (18,7%), Satar Mese Utara (15,6%), Langke Rembong (6,4%), Rahong Utara (14,2%), Reok (18,0%) dan Reok Barat (15,5%). Pencapaian tersebut merupakan hal yang bagus mengingat pada tahun sebelumnya (2021) prevalensi stunting di Kabupaten Manggarai secara keseluruhan berstatus “merah” yakni 33%.

Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia, Gabriel Goa dan Ketua Aliansi Masyarakat Madani Nasional FLOBAMORA, Roy Watu Pati menduga terjadinya penyalahgunaan anggaran penanganan stunting oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keduanya berpendapat berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK Nomor: 91.C/LHP/XIX.KUPANG/05/2021 tertanggal 17 Mei 2021 tentang Kinerja Atas Efektifitas Upaya Pemprov NTT dalam Mendukung Percepatan Pencegahan Stunting Tahun Anggaran 2018-2021.

Dikutip dari Surat Kabar Katong NTT.com pada 24 Maret 2022 (<https://katongntt.com/>) “sejumlah program yang dinilai kurang tepat sasaran di antaranya pemberian makanan tambahan senilai Rp. 46,5 miliar. Pengembangan air bersih senilai Rp. 8,7 miliar tidak direalisasikan pada Desa prioritas pencegahan stunting. Selanjutnya, hibah ternak sekitar Rp. 18,1 miliar, rumah pangan lestari sekitar Rp.9,9 milyar dan bantuan stimulan perumahan sekitar Rp.32,2 miliar.”

Di dalam penelitian Maria Sriana Banul dkk (2022) dengan judul Pemberdayaan Keluarga dalam Pencegahan Stunting di Desa Rai Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur menyebutkan “minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat di Desa Rai tentang pencegahan stunting merupakan salah faktor adanya stunting di Desa tersebut. Sampai saat ini pemerintah Kabupaten

Manggarai telah melakukan berbagai upaya untuk percepatan penurunan stunting akan tetapi masalah stunting di Manggarai masih ada dan tinggi.” Berdasarkan hasil wawancara Maria Sriana Banul dkk (2022) terhadap keluarga yang memiliki stunting di Desa Rai menyimpulkan salah satu penyebab terjadinya stunting adalah masih kurangnya peran dan perhatian dari keluarga dalam menjaga pertumbuhan dan perkembangan anaknya.

Selain minimnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam mengatasi stunting, masalah pengadaan sarana dan prasarana pendukung juga perlu diperhatikan. Pernyataan tersebut diperoleh dari Surat Kabar Rakyat NTT pada 7 Agustus 2021 (<https://rakyatntt.com/>) seperti berikut:

Kami sangat membutuhkan semua ini. Secara pribadi dan juga mewakili teman-teman yang ada di puskesmas, internal maupun di unit Pustu maupun Poskesdes mengucapkan terima kasih atas semua yang diberikan oleh Mama Yeni, ungkap Ermelinda Kepala Puskesmas Pagal. Senada dengan itu, Kapus Wae Codi, Mikael Eduar Kluman menjelaskan, saat ini instansi yang dipimpinnya memiliki banyak kekurangan Alkes. Bahkan paling urgen adalah microtoise atau alat pengukur stunting. Microtoise yang ada di Puskesmas Wae Codi sudah rusak dan sudah tak bisa digunakan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu.

1. Skripsi Aji Bayu Pangestu (2020) dengan judul *Dynamic governance* Dalam Pengaturan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Batu, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis bagaimana dinamika tata kelola dalam pengaturan dan penertiban PKL di Kota Batu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang dinamika tata kelola dalam pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima di Kota Batu. Lokasi penelitian bertempat di Diskumdag dan Satpol PP Kota Batu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Batu dalam hal penertiban dan penertiban PKL dapat dikatakan telah merepresentasikan pemerintahan yang dinamis. Dimana dalam hal ini Pemkot Batu telah menerapkan seluruh elemen tata pemerintahan dinamis, baik dari segi kapabilitas tata kelola dinamis yang terdiri dari kemampuan berpikir ke depan, berpikir lagi, dan berpikir lintas batas. Selain itu, juga telah menggunakan prinsip-prinsip budaya organisasi dalam setiap proses kapabilitas dinamis tersebut.

2. Skripsi Lina Yulianti (2015) dengan judul *Dynamic governance* Unit Organisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu Diy Dalam Mempersiapkan UMKM DIY Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Manajemen Dan Kebijakan Publik, Universitas Gajah Mada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana *Dynamic governance* PLUT DIY dalam mempersiapkan UMKM DIY menghadapi perubahan eksternal atas tantangan global kaitannya dengan MEA, dan mengetahui strategi-strategi yang telah dirancang dan dilakukan PLUT DIY dalam mempersiapkan UMKM DIY menghadapi MEA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapabilitas organisasi PLUT DIY dalam melakukan Thinking ahead belum cukup memadai, ditunjukkan dengan adanya ketidakmampuan PLUT DIY dalam membantu UMKM DIY untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapinya. Ini disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan/wawasan yang dimiliki oleh pegawai PLUT DIY. Pada sisi thinking again, kapabilitas PLUT DIY juga belum cukup memadai. Evaluasi yang merupakan bentuk refleksi dari PLUT DIY atas berbagai macam program kegiatannya belum cukup memberikan perubahan secara signifikan bagi penguatan posisi UMKM DIY. Selanjutnya, pada sisi Thinking across kapabilitas PLUT DIY juga belum cukup memadai. Hal ini ditunjukkan dengan belum cukup mampunya PLUT DIY dalam melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang bersinggungan dengan UMKM guna mendapatkan kesepakatan-kesepakatan kerjasama yang berguna bagi pengembangan UMKM DIY.

3. Skripsi Ardi Rodhita Setiawan (2022) dengan judul Analisis Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dalam Perspektif *Dynamic governance* (Studi Tentang Kapabilitas Dinamis Pada Dinas Sosial Kota Surabaya), Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Surabaya mengembangkan program Rutilahu dengan melakukan inovasi e-Rutilahu dan berintegrasi dengan Padat Karya serta bekerjasama dengan perusahaan CSR, developer, Baznas Kota Surabaya. Namun dalam praktek di lapangan, proses administrasi program Rutilahu masih dianggap rumit dibandingkan dengan program rehabilitasi sosial swasta, sehingga perlu dilakukan penyederhanaan pelayanan administrasi agar efektif. Selain itu, kendala pokok dan kendala teknis perlu diperhatikan sebagai bahan evaluasi agar pelayanan program Rutilahu dapat lebih tepat sasaran dan maksimal

4. Skripsi Muhammad Ichsan (2022) dengan judul Penerapan Kapabilitas *Dynamic governance* di Masa Pandemi Dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana APBD Kota Padang Tahun 2020, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Hasil temuan peneliti bahwa penerapan kapabilitas *Dynamic governance* sudah berjalan baik, namun masih ditemukannya lembaga terkait yang belum menerapkan kapabilitas *dynamic governance*, hal ini dibuktikan dengan: Pertama, Pemerintahan Kota Padang terus melakukan pengkajian kebijakan untuk meringankan masyarakat di masa pandemi; Kedua, ditemukannya pihak kelurahan yang mengembalikan BLT tersebut kepada Dinas Sosial dan ditemukan juga kelurahan yang tidak menjalankan sesuai dengan SOP; Ketiga, Pemerintahan telah melakukan transformasi dalam hal pendataan penerima BLT dari yang secara manual menjadi yang menggunakan teknologi.

5. Skripsi Yuni Kartika Fajri (2019) dengan judul *Dynamic governance* Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Thinking ahead (berpikir kedepan) dalam Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) mengharuskan setiap kota memiliki lahan terbuka hijau seperti taman perkotaan dan hutan kota minimal 30%. Thinking again (Berpikir lagi) yang dilakukan pemerintah kota masih kesulitan dalam memenuhi target RTH dimana kota Makassar masih dibawah 10 % dari 30 % persyaratan yang ada. Thinking across (berpikir lintas batas) yang dilakukan oleh pemerintah bahwa evaluasi yang perlu diperkuat adalah komitmen bersama untuk menambah luas lahan agar mencapai 30% luas lahan terbuka hijau kota selain itu perlunya peningkatan peran pemerintah, swasta dan masyarakat yang sinergis untuk mengoptimal Lahan Terbuka.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian di atas memiliki persamaan dalam metode penelitian yakni menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Perbedaan kelima penelitian di atas terletak pada teori yang digunakan dan juga lokus penelitian. Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan mengambil Teori Kapabilitas *Dynamic governance* menurut Neo dan Chen (2007) dalam Syafri (2012) sebagai bahan pendekatan konsep penelitian ini.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis *Dynamic governance* Dalam Mengatasi Stunting di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur.

II. METODE

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif sebab metode kualitatif mendeskripsikan kejadian yang sebenarnya di lapangan pada saat penelitian dilaksanakan. Sumber data penelitian ini yakni: *Person* (orang), *Place* (tempat), dan *Paper* (dokumen). Teknik analisis data yang digunakan adalah: *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data) dan *Conclusion Drawing / Verivication* (Penarikan Kesimpulan)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 *Dynamic governance* Dalam Mengatasi Stunting di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui *Dynamic governance* dalam mengatasi Stunting di Kabupaten Manggarai, dalam hal ini penelitian dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai. Penelitian *Dynamic governance* dalam mengatasi Stunting di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan berdasarkan teori kapabilitas *dynamic governance* menurut Neo dan Chen (2007) dalam Syafri (2012:180-186) berupa tiga unsur yaitu *Thinking ahead* (berpikir kedepan), *Thinking again* (berpikir Kembali), dan *Thinking across* (berpikir keluar).

3.1.1 *Thinking ahead* (berpikir kedepan)

3.1.1.1 Tujuan Kebijakan

Pernyataan pertama disampaikan oleh Bapak Frumencius Linus Tojo Kurniawan, SE selaku Asisten Adm. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Manggarai dilaksanakan pada hari kamis, 13 januari 2023 jam 09.00 WITA bertempat di ruangan Asisten Adm. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Manggarai, menyatakan:

Tujuan kebijakan dalam mengatasi stunting adalah untuk memastikan bahwa anak-anak tumbuh dengan sehat dan optimal, sehingga mereka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mencapai potensi penuh mereka. Sebagai orang tua tentunya kita tidak ingin anak-anak kita tumbuh dalam keadaan yang kurang baik, kita pasti menginginkan hal terbaik bagi mereka.

Pernyataan berikutnya disampaikan oleh Bapak Drg. Bartolomeus Hermopan selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai dilaksanakan pada hari kamis, 13 januari 2023 jam 09.00 WITA bertempat di ruangan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, menyatakan:

Tujuan kebijakan penanganan stunting tidak terlepas dari tujuan nasional penanganan stunting itu sendiri yakni menurunkan stunting dengan target di bawah 14% pada 2024 mendatang. Selain itu, juga untuk menghasilkan generasi muda di Kabupaten Manggarai yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Kemudian Ibu Yustina Jut, SKM, M.Kes selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai dilaksanakan pada hari kamis, 13 januari 2023 jam 09.00 WITA bertempat di ruangan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai menyatakan:

Tujuan kebijakan dalam mengatasi stunting yakni meminimalisir kasus stunting itu sendiri. bila kasus stunting menurun maka dapat dipastikan bahwa anak-anak di Kabupaten Manggarai tumbuh dengan sehat, dan dengan sendirinya kita akan memiliki kader-kader penerus bangsa yang sehat dan berkualitas khususnya bagi Kabupaten Manggarai.

3.1.1.2 Dampak Pembangunan

Pernyataan pertama disampaikan oleh Bapak Frumencius Linus Tojo Kurniawan, SE selaku Asisten Adm. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Manggarai dilaksanakan pada hari kamis, 13 januari 2023 jam 09.00 WITA bertempat di ruangan Asisten Adm. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Manggarai, menyatakan “Dampak pembangunan yang digunakan

dalam mengatasi stunting dapat sangat signifikan, terutama jika diimplementasikan dengan baik dan berkelanjutan. Seperti tentunya menurunkan tingkat stunting, dan juga meningkatkan produktivitas anak”.

Pernyataan berikutnya disampaikan oleh Bapak Drg. Bartolomeus Hermopan selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai dilaksanakan pada hari Kamis, 13 Januari 2023 jam 09.00 WITA bertempat di ruangan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai.:

Dampak dari regulasi yang ada baik itu berkaitan dengan peraturan bupati yakni cukup bagus, dimana tercipta kerjasama berbagai sektor yang bertugas dalam penanganan stunting di Kabupaten Manggarai. Semuanya bergerak untuk untuk bekerjasama dalam penanganan stunting.

Kemudian Ibu Yustina Jut, SKM, M.Kes selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai dilaksanakan pada hari Kamis, 13 Januari 2023 jam 09.00 WITA bertempat di ruangan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai menyatakan “Dampak pembangunan yang ada dapat dilihat dari hasil pengukuran stunting terakhir pada bulan Agustus tahun 2022 yakni 4.313 kasus dimana menunjukkan penurunan kasus stunting dari 5.320 kasus pada pengukuran bulan Februari tahun 2022”

Tabel Daftar Perbandingan Jumlah Sasaran Stunting Hasil Pengukuran Februari dan Agustus Tahun 2022 Per Kecamatan

NO	KECAMATAN	JUMLAH SASARAN STUNTING		KETERANGAN
		FEBRUARI 2022	AGUSTUS 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KECAMATAN RUTENG	1045	999	TURUN
2	KECAMATAN LELAK	370	227	TURUN
3	KECAMATAN RAHONG UTARA	257	168	TURUN
4	KECAMATAN LANGKE REMBONG	286	214	TURUN
5	KECAMATAN WAE RII	861	596	TURUN
6	KECAMATAN CIBAL	588	510	TURUN
7	KECAMATAN CIBAL BARAT	311	308	TURUN
8	KECAMATAN REOK	301	117	TURUN
9	KECAMATAN REOK BARAT	223	263	NAIK
10	KECAMATAN SATARMESE	531	499	TURUN
11	KECAMATAN SATARMESE BARAT	348	244	TURUN
12	KECAMATAN SATARMESE UTARA	199	168	TURUN
TOTAL MANGGARAI		5320	4313	TURUN

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai, 2022

Tabel di atas menunjukkan hasil pengukuran stunting periode bulan Februari dan Agustus pada tahun 2022 di Kabupaten Manggarai, dimana menunjukkan adanya penurunan angka stunting menjadi 4.313 kasus pada bulan Agustus yang sebelumnya 5.320 kasus pada pengukuran bulan Februari tahun 2022. Kecamatan Reok Barat menjadi satu-satunya kecamatan yang tidak mengalami penurunan angka stunting, dan justru sebaliknya mengalami kenaikan dari 223 kasus menjadi 263 kasus stunting. Hal ini menunjukkan bahwa setiap program dan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai masih belum maksimal dan merata di setiap Desa maupun Kecamatannya.

3.1.1.3 Ancaman Terhadap Peluang Baru

Pernyataan pertama disampaikan oleh Bapak Frumencius Linus Tojo Kurniawan, SE selaku Asisten Adm. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Manggarai dilaksanakan pada hari Kamis, 13 Januari 2023 jam 09.00 WITA bertempat di ruangan Asisten Adm. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Manggarai.

Menentukan arah kebijakan yang tepat dengan mempertimbangkan perubahan sosial dan lingkungan serta berfokus pada intervensi yang efektif. Selain itu juga kita melakukan evaluasi terhadap hasil yang dicapai di periode sebelumnya dan kemudian memaksimalkannya di periode berikutnya.

Pernyataan berikutnya disampaikan oleh Bapak Drg. Bartolomeus Hermopan selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai dilaksanakan pada hari Kamis, 13 Januari 2023 jam 09.00 WITA bertempat di ruangan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai.:

Saya kira apa yang sudah kita lakukan selama ini itu sudah tepat sasaran. Artinya, regulasi dalam penanganan stunting kabupaten maupun desa itu sudah tepat sasaran, Cuma yang mungkin perlu adalah kualitas dari pendekatan. Pilihan barunya adalah perlu ada pendekatan yang bersifat lebih humanistik dalam hal ini tidak hanya melihat masyarakat sebagai obyek, tetapi menjadi subyek, sehingga mereka menjadi mandiri dalam penanganan stunting.

Kemudian Ibu Yustina Jut, SKM, M.Kes selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai dilaksanakan pada hari Kamis, 13 Januari 2023 jam 09.00 WITA bertempat di ruangan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai menyatakan:

Saya kira melalui evaluasi terhadap program sebelumnya seperti program yang kami buat adalah edukasi 1000 hari pertama (270 hari selama kehamilan dan 730 hari setelah kehamilan) kehidupan kepada balita. Kami melakukan pendampingan terhadap calon pengantin, selama 3 bulan sebelum menikah dengan tujuan calon pengantin siap fisik maupun mental. Kami memiliki 723 kader atau tim pendamping keluarga di lapangan. Tiap tim berisi 3 orang yakni pertama bidan, 1 kader KB (Keluarga Berencana), dan 1 kader PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga)

3.1.1.4 Mempengaruhi Pembuat Kebijakan

Ketua RW 004 Kelurahan Karot Bapak Yoki Rahmat selaku Tokoh Masyarakat yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 21 Januari 2023 jam 15.00 WITA bertempat di Rumah Bapak Yoki Rahmat, mengatakan:

Bagaimana mempengaruhi pemerintah mengenai stunting adalah dengan menunjukkan secara langsung kepada mereka masalah yang ada. Maksud saya adalah, kita sebagai masyarakat jangan menunjukkan sikap bodoh amat melainkan menumbuhkan kesadaran untuk ikut ambil bagian mengatasi stunting.

Berikutnya Kepala Sekolah SMAK St. Fransiskus Xaverius Ruteng Rm. Martinus W. Wilian, Pr selaku Tokoh Pendidik yang dilaksanakan pada hari Kamis, 19 Januari 2023 jam 11.00 WITA bertempat di Ruang Kepala Sekolah SMAK St. Fransiskus Xaverius Ruteng, menyampaikan:

Menurut saya cara terbaik untuk mempengaruhi isu stunting terhadap pembuat kebijakan adalah dengan mendekati atau menghantui mereka dengan masalah stunting yang ada. Maksudnya masyarakat harus berani menyuarakan suaranya dalam melawan maraknya stunting kepada pemerintah. Karena para pembuat kebijakan jarang bertemu dengan masyarakat stunting apalagi mengalami stunting itu sendiri. Sehingga, mereka tidak mengetahui dengan baik segala sesuatu yang terjadi di masyarakat.

Ketua BEM Universitas St. Paulus Ruteng Anho Wagut selaku Tokoh Pemuda/i yang dilaksanakan pada hari Selasa, 17 Januari 2023 jam 14.00 WITA Tokoh Pemuda/i bertempat di Ruang BEM Universitas Katolik St. Paulus Ruteng, juga menyampaikan:

Kami sendiri mempengaruhi pemerintah untuk memperhatikan masalah stunting dengan membuat seminar dan diskusi mengenai stunting di beberapa tempat. Seperti yang baru-baru ini kami melaksanakan seminar di Aula UNIKA Ruteng dengan turut mengundang dari Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan juga beberapa pihak lainnya.

3.1.2 *Thinking again* (berpikir Kembali)

3.1.2.1 Analisis Kinerja

Pernyataan pertama disampaikan oleh Bapak Drs. Jahang Fansi Aldus selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai dilaksanakan pada hari Kamis, 12 Januari 2023 jam 09.00 WITA bertempat ruangan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai, menyatakan “Sejauh ini terjadi peningkatan dalam penanganan stunting, dimana hal ini dilihat dari hasil pengukuran terakhir pada bulan Agustus turun menjadi 4.313 (16,4%) dari 5.320 (20,0 %) pada bulan Februari 2022”.

Pernyataan berikutnya disampaikan oleh Bapak Drg. Bartolomeus Hermopan selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai dilaksanakan pada hari Kamis, 13 Januari 2023 jam 09.00 WITA bertempat di ruangan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai.:

Tahun 2022 terjadi penurunan 3 % jumlah stunting dan hasilnya bagus. Namun di sisi yang lain terjadi Kerjasama yang baik diantara setiap komponen yang berperan dalam penanganan stunting. Selama ini kami juga memberdayakan program “Lonto Leok”, dimana kita berkumpul di rumah adat, dan disana bersama tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama kita bersama-sama untuk mencari solusi. Sehingga Gerakan penanganan stunting di wilayah tersebut tidak menjadi top down tetapi juga berasal dari mereka.

Kemudian Ibu Yustina Jut, SKM, M.Kes selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai dilaksanakan pada hari Kamis, 13 Januari 2023 jam 09.00 WITA bertempat di ruangan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai menyatakan:

Untuk mengatasi stunting inikan secara keroyokan, bukan hanya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tetapi ikut pula Dinas Kesehatan dengan menyediakan fasilitas Kesehatan seperti puskesmas, Dinas Pendidikan dengan memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai stunting, Dinas Pertanian dengan mendukung setiap program dan kerja dalam menyediakan pangan yang cukup dll. Artinya dalam mengatasi stunting perlu adanya kolaborasi dan kerjasama antar setiap OPD berkaitan serta juga dengan melibatkan mitra-mitra swasta seperti Bank NTT dan LSM.

Gambar Evaluasi Program Penurunan Stunting di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, 2023

Gambar di atas menunjukkan salah satu bentuk evaluasi bersama di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai, dalam upaya mengatasi stunting di Kabupaten Manggarai.

3.1.2.2 Menemukan Penyebab

Pernyataan pertama disampaikan oleh Bapak Drs. Jahang Fansi Aldus selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai dilaksanakan pada hari Kamis, 12 Januari 2023 jam 09.00 WITA bertempat di ruangan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai.

Penyebab tercapainya penanganan stunting di Kabupaten Manggarai karena adanya kolaborasi dan kerjasama yang intim dari setiap komponen-komponen seperti pemerintah, swasta maupun masyarakat sendiri. Sedangkan tidak tercapainya mungkin karena setiap program yang ada masih belum maksimal dijalankan.

Pernyataan berikutnya disampaikan oleh Bapak Drg. Bartolomeus Hermopan selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai dilaksanakan pada hari Kamis, 13 Januari 2023 jam 09.00 WITA bertempat di ruangan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai.:

Di tahun kemarin tercapainya penanganan stunting karena adanya Kerjasama antara setiap OPD dan swasta. Kemudian ada hambatan yakni, belum adanya kesadaran dari pihak masyarakat juga dalam menangani dan pentingnya penanganan stunting. Masyarakat hanya menunggu bantuan atau insentif dari pemerintah dan cenderung pasif.

Kemudian Ibu Yustina Jut, SKM, M.Kes selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai dilaksanakan pada hari Kamis, 13 Januari 2023 jam 09.00 WITA bertempat di ruangan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai menyatakan “Tercapai tentunya karena ada komunikasi, kerjasama, dan koordinasi yang baik di seluruh TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting). Tidak tercapai karena tidak adanya kerjasama, koordinasi ataupun komunikasi yang baik diantara TPPS tersebut”.

3.1.2.3 Meninjau Kembali Faktor yang Menonjol

Pernyataan pertama disampaikan oleh Bapak Drs.Jahang Fansi Aldus selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai dilaksanakan pada hari Kamis, 12 Januari 2023 jam 09.00 WITA bertempat ruangan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai, menyatakan “Faktor menonjol tercapainya adalah kerjasama. Sedangkan faktor menonjol tidak tercapainya adalah program yang diterapkan masih belum maksimal”

Pernyataan berikutnya disampaikan oleh Bapak Drg. Bartolomeus Hermopan selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai dilaksanakan pada hari Kamis, 13 Januari 2023 jam 09.00 WITA bertempat di ruangan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai.:

Faktor menonjolnya adalah kerjasama tim. Hal menonjol kedua yakni adanya keterlibatan pihak swasta dan media serta para mahasiswa. Sedangkan faktor menonjol tidak tercapainya adalah minimnya keikutsertaan masyarakat untuk berkerjasama dalam mengatasi stunting.

Kemudian Ibu Yustina Jut, SKM, M.Kes selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai dilaksanakan pada hari Kamis, 13 Januari 2023 jam 09.00 WITA bertempat di ruangan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai menyatakan “Faktor menonjol tercapainya adalah kerjasama tim. Sedangkan faktor menonjol tidak tercapainya mungkin masih ada kekurangan dalam komunikasi dan kerjasama tim”.

3.1.2.4 Mendesain Kembali Program

Pernyataan pertama disampaikan oleh Bapak Drs.Jahang Fansi Aldus selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai dilaksanakan pada hari Kamis, 12 Januari 2023 jam 09.00 WITA bertempat ruangan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai, menyatakan “Untuk desain program baru mungkin lebih memaksimalkan lagi pemberdayaan kepada masyarakat mengenai penanganan stunting agar dari masyarakat sendiri tumbuh kemauan untuk secara lebih aktif ikut berpartisipasi mengatasi stunting”.

Pernyataan berikutnya disampaikan oleh Bapak Drg. Bartolomeus Hermopan selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai dilaksanakan pada hari Kamis, 13 Januari 2023 jam 09.00 WITA bertempat di ruangan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, menyatakan “Untuk sekarang kami masih melanjutkan program yang lalu yakni mengatakan bahwa stunting adalah persoalan bersama. Jadi setiap komponen baik itu masyarakat dan pemerintah dapat saling membantu dalam menangani stunting”.

Kemudian Ibu Yustina Jut, SKM, M.Kes selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai dilaksanakan pada hari Kamis, 13 Januari 2023 jam 09.00 WITA bertempat di ruangan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai menyatakan “Untuk sekarang kami hanya berfokus untuk mengembangkan program-program yang sudah ada. Namun kami juga sedang menyusun rencana dengan menggunakan metode kontrasepsi”.

3.1.2.5 Menerapkan Kebijakan Baru

Pernyataan pertama disampaikan oleh Bapak Drs.Jahang Fansi Aldus selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai dilaksanakan pada hari Kamis, 12 Januari 2023 jam 09.00 WITA bertempat ruangan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai, menyatakan “Desain program itu sendiri mungkin dengan melanjutkan program lama seperti Lonto Leok bersama tokoh-tokoh masyarakat di rumah adat untuk berbagi ilmu dan wawasan guna mengatasi stunting”.

Pernyataan berikutnya disampaikan oleh Bapak Drg. Bartolomeus Hermopan selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai dilaksanakan pada hari Kamis, 13 Januari 2023 jam 09.00 WITA bertempat di ruangan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, menyatakan “Tidak ada program baru, hanya perlu pembaharuan saja. Di Dinas Kesehatan sendiri ada program kematian ibu

dan anak. Kita mengatasi ibu hamil atau bersalin, dengan memaksimalkan pelayanan kesehatan yang kemudian sekaligus mengatasi stunting”.

Gambar Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Wae Nakeng



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, 2023

Gambar di atas menunjukkan salah satu contoh pelayanan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas Wae Nakeng Kecamatan Wae Rii. Pelayanan kesehatan merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan guna mengatasi masalah stunting di Kabupaten Manggarai, dimana hal ini dapat berupa pengukuran tinggi dan berat badan anak, pemberian imunisasi, sosialisasi dll.

Kemudian Ibu Yustina Jut, SKM, M.Kes selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai dilaksanakan pada hari Kamis, 13 Januari 2023 jam 09.00 WITA bertempat di ruangan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai menyatakan:

Desain program yang ada adalah dengan menggunakan 7 metode kontrasepsi yaitu Medis Operasi Wanita, Medis Operasi Pria, EMD (8 tahun tidak melahirkan), Implan (tidak melahirkan selama 3 tahun), Suntikan, Pill dan Kondom. Dengan menggunakan 7 metode kontrasepsi di atas maka tidak ada kelahiran, maka tentunya tidak ada anak stunting, turunnya angka kelahiran, tidak ada anak yang meninggal.

3.1.3 Thinking across (berpikir keluar)

3.1.3.1 Menemukan Program Yang Sama

Bapak Drg. Bartolomeus Hermopan selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai dilaksanakan pada hari Kamis, 13 Januari 2023 jam 09.00 WITA bertempat di ruangan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, menyampaikan, menyatakan “Kita berkolaborasi dengan pihak-pihak swasta. Tidak ada program khusus masih sekitar program sebelumnya. Yakni program Lonto Leok dan juga pemberdayaan serta pelayanan kepada ibu hamil”.

Kemudian Ibu Yustina Jut, SKM, M.Kes selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai dilaksanakan pada hari Kamis, 13 Januari 2023 jam 09.00 WITA bertempat di ruangan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai, menyampaikan, menyatakan “Tentunya ada, seperti beberapa kabupaten di pulau Jawa berinovasi menggunakan teknologi informasi untuk mendata balita stunting juga memudahkan dalam menyalurkan bantuan kepada balita stunting”.

Ibu Erlin Pudjiastuti, S.KM selaku Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai dilaksanakan pada hari Selasa, 10 Januari 2023 jam 11.00 WITA bertempat di ruangan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, juga menyampaikan:

Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dengan memberikan makanan tambahan yang mengandung gizi yang cukup untuk bayi dan anak-anak yang rentan mengalami stunting. Ada juga program Peningkatan Kualitas Air Minum, program ini bertujuan untuk memastikan air minum yang dikonsumsi masyarakat aman dan berkualitas.

Serta Ibu Familia Ngambut, S.ST, M.KM selaku Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan khusus Anak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai dilaksanakan pada hari Rabu, 11 Januari 2023 jam 11.00 WITA bertempat di ruangan Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan khusus Anak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai, menyampaikan:

Program lain mungkin dengan peningkatan Akses Ke Layanan Kesehatan untuk memastikan masyarakat memiliki akses yang mudah dan terjangkau ke layanan kesehatan. Peningkatan Kualitas Pendidikan juga menjadi penting karena mempengaruhi kemampuan anak untuk belajar dan berkembang secara akademik.

3.1.3.2 Merefleksikan Program

Bapak Drg. Bartolomeus Hermopan selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai dilaksanakan pada hari Kamis, 13 Januari 2023 jam 09.00 WITA bertempat di ruangan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, menyatakan “Hal barunya adalah dalam pelaksanaan program Lonto Leok serta pelayanan kepada ibu hamil, kami menemukan keadaan dimana masyarakat sendiri cenderung pasif, artinya belum ada kesadaran menyeluruh untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi stunting”.

Kemudian Ibu Yustina Jut, SKM, M.Kes selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai dilaksanakan pada hari Kamis, 13 Januari 2023 jam 09.00 WITA bertempat di ruangan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai, menyampaikan:

Hal barunya adalah kita diarahkan untuk bisa memanfaatkan teknologi informasi dalam intervensi penurunan stunting. Sayangnya berpikir untuk menerapkannya di Kabupaten Manggarai saya rasa bukan pilihan yang tepat karena sejujurnya masih banyak masyarakat maupun pegawai yang minim pengetahuan tentang teknologi informasi.

Ibu Erlin Pudjiastuti, S.KM selaku Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai dilaksanakan pada hari Selasa, 10 Januari 2023 jam 11.00 WITA bertempat di ruangan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, juga menyampaikan “Hal barunya melalui program PMT kepada balita stunting serta memastikan kualitas air bersih terpenuhi maka kasus stunting juga akan menurun”

Serta Ibu Familia Ngambut, S.ST, M.KM selaku Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan khusus Anak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai dilaksanakan pada hari Rabu, 11 Januari 2023 jam 11.00 WITA bertempat di ruangan Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan khusus Anak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai, menyampaikan “Kita dapat membangun lebih banyak posyandu di desa-desa agar memudahkan masyarakat berobat termasuk pemeriksaan kesehatan rutin untuk bayi dan anak-anak. Membangun sekolah-sekolah akan meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil”.

3.1.3.3 Evaluasi Program

Bapak Drg. Bartolomeus Hermopan selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai dilaksanakan pada hari Kamis, 13 Januari 2023 jam 09.00 WITA bertempat di ruangan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, menyampaikan “Hal pentingnya dengan menyadari sikap masyarakat yang pasif, kami berupaya untuk lebih intens lagi dalam mensosialisasikan pentingnya penanganan serta pencegahan stunting kepada masyarakat”.

Kemudian Ibu Yustina Jut, SKM, M.Kes selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai dilaksanakan pada hari Kamis, 13 Januari 2023 jam 09.00 WITA bertempat di ruangan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai, menyampaikan “Maka dari itu, pertama-tama kita perlu melakukan pembenahan atas sarana dan prasarana dan lebih penting lagi membangun sumber daya manusia yang lebih baik untuk mendukung penggunaan dan penerapan teknologi informasi”.

Ibu Erlin Pudjiastuti, S.KM selaku Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai dilaksanakan pada hari Selasa, 10 Januari 2023 jam 11.00 WITA bertempat di ruangan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, juga menyampaikan “Dengan memberikan PMT kepada balita stunting kita berharap agar gizi mereka dapat terpenuhi. Kemudian kualitas air bersih yang tinggi akan memberi efek pada perkembangan balita juga”.

Serta Ibu Familia Ngambut, S.ST, M.KM selaku Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan khusus Anak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai dilaksanakan pada hari Rabu, 11 Januari 2023 jam 11.00 WITA bertempat di ruangan Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan khusus Anak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai, menyampaikan “Pemeriksaan kesehatan anak yang rutin dan juga peningkatan kualitas Pendidikan anak-anak disarankan dapat membantu dalam menurunkan angka stunting”.

3.1.3.4 Menghubungkan Ide-Ide Baru

Bapak Drg. Bartolomeus Hermopan selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai dilaksanakan pada hari Kamis, 13 Januari 2023 jam 09.00 WITA bertempat di ruangan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, menyampaikan “Mungkin Lonto Leok yang sedang di diskusikan dengan membuat inovasi baru. Adapun ide baru yang ada adalah dengan meningkatkan partisipatif atau kesadaran setiap komponen”.

Kemudian Ibu Yustina Jut, SKM, M.Kes selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai dilaksanakan pada hari Kamis, 13 Januari 2023 jam 09.00 WITA bertempat di ruangan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai, menyampaikan:

Menghubungkan ide penerapan teknologi informasi dalam mengatasi stunting tadi yakni dengan mendata secara lebih terperinci dan efisien berapa jumlah anak yang mengalami stunting. Hal ini akan mempermudah kita sebagai pemerintah untuk melakukan intervensi, untuk lebih mudah menyalurkan bantuan serta meminimalisir biaya operasi penanganan stunting tadi.

Ibu Erlin Pudjiastuti, S.KM selaku Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai dilaksanakan pada hari Selasa, 10 Januari 2023 jam 11.00 WITA bertempat di ruangan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, juga menyampaikan “Berangkat dari program Lonto Leok dan juga pos gizi, yang merupakan program lama yang sudah ada kedepannya kita juga akan menyalurkan PMT kepada balita stunting. Peningkatan air bersih sendiri bisa dibicarakan dengan Perusahaan Air Minum (PAM) terkait”.

Serta Familia Ngambut, S.ST, M.KM selaku Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan khusus Anak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai dilaksanakan pada hari Rabu, 11 Januari 2023 jam 11.00 WITA bertempat di ruangan Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan khusus Anak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai, menyampaikan:

Mungkin melalui TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) yang ada, terlebih dahulu kita membuka layanan pemeriksaan kesehatan di daerah-daerah terpencil dan membuka kelas khusus kepada anak-anak. Kita berharap dari hal kecil tadi, kemudian hari akan disalurkan dana untuk membangun posyandu dan sekolah yang lebih layak bagi anak-anak.

3.1.3.5 Menyesuaikan Kebutuhan Masyarakat

Bapak Drg. Bartolomeus Hermopan selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai dilaksanakan pada hari Kamis, 13 Januari 2023 jam 09.00 WITA bertempat di ruangan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, menyampaikan “Dengan melihat apa yang menjadi keraguan masyarakat terhadap pentingnya masalah stunting dan kemudian melakukan sosialisasi serta pemberdayaan yang lebih baik lagi”.

Kemudian Ibu Yustina Jut, SKM, M.Kes selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai dilaksanakan pada hari Kamis, 13 Januari 2023 jam 09.00 WITA bertempat di ruangan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai, menyampaikan:

Kebutuhan masyarakat adalah bagaimana kita sebagai pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada mereka. Jadi saya pikir, dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi tadi tentunya akan intervensi stunting akan lebih terarah kepada setiap balita penderita. Namun hal ini juga perlu mendapat dukungan dari masyarakat sendiri.

Ibu Erlin Pudjiastuti, S.KM selaku Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai dilaksanakan pada hari Selasa, 10 Januari 2023 jam 11.00 WITA bertempat di ruangan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, juga menyampaikan “Sejauh yang kami perhatikan, tingkat ekonomi masyarakat Kabupaten Manggarai masih jauh dari sejahtera. Mungkin dengan bantuan yang lebih banyak dari negara seperti PMT dan peningkatan kualitas air minum tadi dapat membantu juga guna menurunkan angka stunting”.

Serta Familia Ngambut, S.ST, M.KM selaku Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan khusus Anak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai dilaksanakan pada hari Rabu, 11 Januari 2023 jam 11.00 WITA bertempat di ruangan Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan khusus Anak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai, menyampaikan:

Dengan melihat kebutuhan masyarakat, saya pikir meningkatkan kualitas sarana pelayanan kesehatan dan kualitas Pendidikan adalah hal yang tepat. Pelayanan kesehatan yang lebih intim membantu dalam memudahkan mendata serta menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Kemudian kualitas Pendidikan yang baik membantu anak-anak untuk lebih berwawasan dan berkompotensi.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian ini adalah *dynamic governance* dalam mengatasi stunting di Kabupaten Manggarai dapat dilihat dari hasil pengukuran stunting terakhir pada bulan Agustus tahun 2022 yakni 4.313 kasus dimana menunjukkan penurunan kasus stunting dari 5.320 kasus pada pengukuran bulan Februari tahun 2022. Kebijakan penurunan stunting juga meningkatkan produktivitas anak yang merupakan hasil dari kerjasama berbagai sektor yang bertugas dalam penanganan stunting di Kabupaten

Manggarai. Kemudian, faktor menonjol tercapainya penanganan stunting di Kabupaten Manggarai adalah kerjasama dan keterlibatan setiap komponen. Faktor menonjol tidak tercapainya adalah minimnya partisipasi masyarakat dan komunikasi antar setiap komponen masih kurang. Huseini (2015:90) menyatakan “Pemerintah Daerah yang dinamis akan mampu melakukan perubahan dalam pembangunan daerahnya pasca pemberlakuan otonomi daerah. Mereka meninggalkan pola pemerintahan lama yang kaku, hierarkis, senang dilayani, dan hanya berorientasi jangka pendek.” Mereka merubah paradigma aparatur pemerintah yang melayani bukan dilayani dengan tujuan memberi pelayanan prima.

IV. KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil analisis terhadap masalah yang terjadi di lapangan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi penelitian mengenai *dynamic governance* dalam mengatasi stunting di Kabupaten Manggarai, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

***Dynamic governance* Dalam Mengatasi Stunting di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kapabilitas *Dynamic governance* menurut Neo dan Chen (2007) dalam Syafri (2012:180-186))**

1. *Thinking ahead* (berpikir kedepan)

a) Tujuan Kebijakan

Penanganan stunting tidak terlepas dari tujuan nasional penanganan stunting itu sendiri. Penanganan stunting dilakukan untuk memastikan bahwa anak-anak tumbuh dengan sehat dan optimal guna menyiapkan kader-kader penerus bangsa yang sehat dan berkualitas.

b) Dampak Pembangunan

Menurunnya tingkat stunting dapat dilihat dari hasil pengukuran stunting terakhir pada bulan agustus tahun 2022 yakni 4.313 kasus dimana menunjukkan penurunan kasus stunting dari 5.320 kasus pada pengukuran bulan februari tahun 2022. Kebijakan penerunan stunting juga meningkatkan produktivitas anak yang merupakan hasil dari kerjasama berbagai sektor yang bertugas dalam penanganan stunting di Kabupaten Manggarai.

c) Ancaman Terhadap Peluang Baru

Evaluasi terhadap program sebelumnya kemudian menentukan arah kebijakan yang tepat dengan mempertimbangkan perubahan sosial dan lingkungan serta berfokus pada intervensi yang efektif. Perlu ada pendekatan yang bersifat lebih humanistik dalam hal ini tidak hanya melihat masyarakat sebagai obyek, tetapi menjadi subyek.

d) Mempengaruhi Pembuat Kebijakan

Menumbuhkan kesadaran untuk ikut ambil bagian mengatasi stunting, masyarakat harus berani menyuarakan suaranya dalam melawan maraknya stunting kepada pemerintah dimana hal ini dapat dilakukan lewat seminar dan diskusi bersama.

2. *Thinking again* (berpikir Kembali)

a) Analisis Kinerja

Peningkatan dalam penanganan stunting, hal ini dilihat dari hasil pengukuran terakhir pada bulan agustus turun menjadi 4.313 (16,4%) dari 5.320 (20,0 %) pada bulan februari 2022 lain. Ini merupakan hasil dari kolaborasi dan kerjasama antar setiap OPD berkaitan serta juga dengan melibatkan mitra-mitra swasta seperti Bank NTT dan LSM.

b) Menemukan Penyebab

Adanya kolaborasi dan kerjasama yang intim dari setiap komponen-komponen seperti pemerintah, swasta maupun masyarakat sendiri. Sedangkan tidak tercapainya karena masih ada program yang belum dijalankan secara maksimal serta minimnya partisipasi masyarakat.

c) Meninjau Kembali Faktor yang Menonjol

Kerjasama dan keterlibatan setiap komponen seperti minimnya partisipasi masyarakat dan komunikasi antar setiap komponen masih kurang.

d) Mendesain Kembali Program

Belum ada, namun pemerintah tetap berfokus pada pengembangan dan peningkatan program-program yang sudah ada sebelumnya.

e) Menerapkan Kebijakan Baru

Melanjutkan program lama seperti Lonto Leok bersama tokoh-tokoh masyarakat di rumah adat untuk berbagi ilmu dan wawasan, kemudian dengan memaksimalkan pelayanan kesehatan serta menerapkan 7 metode kontrasepsi.

3. *Thinking across (berpikir keluar)*

a) Menemukan Program Yang Sama

Berkolaborasi pihak-pihak swasta, Pemberian Makanan Tambahan (PMT), berinovasi menggunakan teknologi informasi untuk mendata balita stunting, serta peningkatan akses layanan kesehatan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.

b) Merefleksikan Program

Pemerintah diarahkan untuk bisa memanfaatkan teknologi informasi dalam intervensi stunting, kemudian adanya kecendrungan dimana masyarakat sendiri cenderung pasif serta, dengan membangun lebih banyak posyandu di desa-desa maka masyarakat lebih mudah berobat termasuk pemeriksaan kesehatan rutin untuk bayi dan anak-anak

c) Evaluasi Program

Pemerintah berupaya untuk lebih intens dalam mensosialisasikan penanganan stunting kepada masyarakat, melakukan pembenahan atas sarana dan prasarana, serta PMT kepada balita stunting disarankan agar gizi balita dapat terpenuhi.

d) Menghubungkan Ide-Ide Baru

Menghubungkan ide penerapan teknologi informasi dalam mengatasi stunting dengan mendata secara lebih terperinci dan efisien berapa jumlah anak yang mengalami stunting kemudian membuka layanan pemeriksaan kesehatan di daerah-daerah terpencil dan membuka kelas khusus kepada anak-anak.

e) Menyesuaikan Kebutuhan Masyarakat

Melihat kebutuhan masyarakat maka pemerintah memaksimalkan penggunaan teknologi informasi agar lebih terarah kepada setiap balita penderita kemudian meningkatkan kualitas sarana pelayanan kesehatan dan kualitas Pendidikan bagi anak-anak di Kabupaten Manggarai.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, seperti waktu dan data penelitian yang belum maksimal dimana dapat mencakup keseluruhan kesenjangan masalah stunting di kabupaten Manggarai secara lebih terperinci. Oleh karena itu penulis menerima masukan dan kritik yang membangun guna perbaikan penelitian yang akan datang.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian ini disarankan dapat menambah wawasan, pengetahuan serta memberikan sumbangan pemikiran terkait *Dynamic governance* dalam mengatasi stunting terhadap penanganan Stunting di Kabupaten Manggarai dan juga memberikan perbandingan teoritis dan fakta yang terjadi di lapangan sebagai pengembangan ilmu terhadap penanganan Stunting di masa mendatang.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai beserta jajarannya yang telah

memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Huseini, M. 2015. *Merekonstruksi Indonesia: sebuah perjalanan menuju dynamic governance*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kemendes RI. 2012. *Riset Kesehatan Dasar*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI.
- Neo, B. S., & Chen, G. 2007. *Dynamic governance: embedding culture, capabilities and change in Singapore*. New Jersey: World Scientific.
- Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep 124/M.Ppn/Hk/10/2021 Tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Pangan Dan Gizi Tahun 2021-2024
- Skripsi Aji Bayu Pangestu. 2020. *Dynamic governance Dalam Pengaturan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Batu*. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Skripsi Ardi Rodhita Setiawan. 2022. *Analisis Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dalam Perspektif Dynamic governance* (Studi Tentang Kapabilitas Dinamis Pada Dinas Sosial Kota Surabaya). Program Studi Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
- Skripsi Lina Yulianti. 2015. *Dynamic governance Unit Organisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu Diy Dalam Mempersiapkan UMKM DIY Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean*. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Manajemen Dan Kebijakan Publik. Universitas Gajah Mada.
- Skripsi Muhammad Ichsan. 2022. *Penerapan Kapabilitas Dynamic governance di Masa Pandemi Dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana APBD Kota Padang Tahun 2020*. Program Studi Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Andalas.
- Skripsi Yuni Kartika Fajri. 2019. *Dynamic governance Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar*. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Banul, M. S., Manggul, M. S., Halu, S. A. N., Dewi, C. F., & Mbohong, C. C. Y. 2022. *Pemberdayaan Keluarga dalam Pencegahan Stunting di Desa Rai Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur*. Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm), 5(8), 2497-2506.
- Kusumawati, E., Rahardjo, S., & Sari, H. P. 2015. *Model pengendalian faktor risiko stunting pada anak bawah tiga tahun*. Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (National Public Health Journal), 9(3), 249-256.
- Mustanir, Ahmad, Kittisak Jermsttiparsert, Akhwan Ali, Sam Hermansyah, and Sakinah Sakinah. 2020. *Village Head Leadership and Bureaucratic Model Towards Good Governance in Sidenreng Rappang*. doi: 10.4108/eai.21-10-2019.2291532
- Rahmadhita, K. 2020. *Permasalahan Stunting dan Pencegahannya*. Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada, 9(1), 225-229.
- Sulistyaningsih, D. A., Panunggal, B., & Murbawani, E. A. 2018. *Status Iodium Urine Dan Asupan Iodium Pada Anak Stunting Usia 12-24 Bulan*. Media Gizi Mikro Indonesia, 9(2), 73-82.
<https://katongntt.com/anggaran-atasi-stunting-di-ntt-rp-165-m-tak-tepat-sasaran/> dikutip pada tanggal 1/11/2022
<https://rakyatntt.com/yeni-veronika-puskesmas-butuh-fasilitas-untuk-edukasi-terkait-masalah-stunting/> dikutip pada tanggal 22/10/2022